

**Pendampingan Digital Literasi, Penggunaan Teknologi komunikasi, dan media sosial desa Bagi BPDDesa Tirta Harja Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin**

<sup>1\*</sup> *Lishapsari Prihartini*, <sup>2</sup> *Marleni*

<sup>1</sup> *Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Stisipol Candradimuka*

, <sup>2</sup> *Program Studi Ilmu Komunikasi, Stisipol Candradimuka*

*\*email penulis koresponden*

**ABSTRAK**

Berdasarkan hasil Pengamatan dan survei diketahui masih kurangnya pemahaman anggota BPD Desa Tirta Harja Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin terhadap peran dan tugasnya dan dalam pengawasan peraturan Desa. Kendala ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan BPD terhadap Pemerintah Desa masih sangat lemah.

Dari sisi komunikasi, pola komunikasi BPD dalam menerima, menyampaikan dan menyebarkan hasil keputusan aspirasi dan peraturan desa dinilai tidak berjalan lancar. Dari survey juga menunjukkan fungsi BPD sebagai legislatif sudah terlaksana namun dalam fungsi BPD sebagai pengayom dan pengawas masih maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya.

Untuk itu lewat pengabdian kepada masyarakat ini tim melakukan pendampingan penggunaan teknologi komunikasi untuk mempermudah saluran penyampaian pesan dari masyarakat ke BPD untuk kemudian disampaikan ke pemerintah desa. Pendampingan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan lamanya melalui tahapan pengamatan yang terdiri dari pengamatan langsung dan survey. Kemudian dicapai kesimpulan dan pola solusi melalui kegiatan pendampingan digital literasi dan penggunaan teknologi komunikasi terhadap sejumlah anggota BPD. Tahapan terakhir dari pengabdian pada masyarakat ini adalah evaluasi dari keseluruhan pendampingan untuk mengetahui apakah pendampingan sudah tepat sasaran.

**Kata Kunci** :BPD, Desa Tirta Harja, Digital Literasi, Teknologi Komunikasi, Media Sosial

---

**ABSTRACT**

*Based on the results of observations and surveys, it is known that there is still a lack of understanding of BPD members in Tirta Harja Village, Muara Sugihan District, Banyuasin Regency on their roles and duties and in supervising village regulations. This obstacle shows that the supervision carried out by the BPD on the Village Government is still very weak.*

*In terms of communication, the BPD's communication pattern in receiving, conveying and disseminating the results of aspiration decisions and village regulations is considered not to run smoothly. The survey also shows that the BPD's function as a legislature has been implemented, but the BPD's function as a protector and supervisor is still maximal in its*

implementation due to the lack of understanding of BPD members on their duties and functions.

For this reason, through community service, the team provides assistance in the use of communication technology to facilitate the channel for delivering messages from the community to the BPD for later submission to the village government. Assistance is carried out in stages for three months through observation stages consisting of direct observations and surveys. Then conclusions and patterns of solutions were reached through digital literacy assistance activities and the use of communication technology for a number of BPD members. The last stage of community service is an evaluation of the overall assistance to find out whether the assistance has been on target.

**Keywords:** BPD, Desa Tirta Harja, Digital Literacy, Communication Technology, Social Media

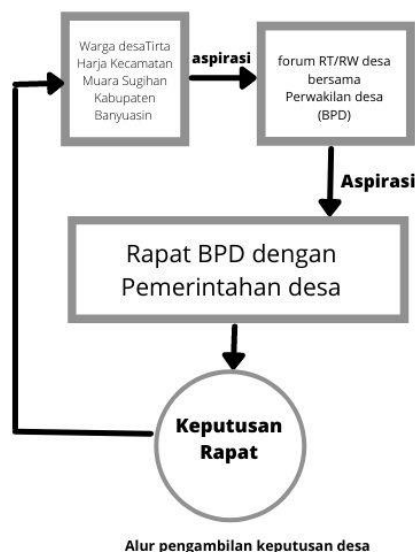
## Pendahuluan

Dalam pengambilan keputusan desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peranan penting. BPD sendiri berperan sebagai perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa. Baik BPD maupun kepala desa memiliki peranan yang sama dalam perencanaan dan penetapan kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan fisik kepala desa.

Produk hasil pengambilan keputusan BPD adalah Peraturan Desa (Perdes) sebagai sebuah nilai yang disusun untuk menata keperluan masyarakat desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kepala desa sebagai struktural eksekutif desa yang juga disepakati BPD.

Dalam pembuatan keputusan di Desa Tirta Harja Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin, forum BPD dan masyarakat atau forum rapat RT/RW biasanya masyarakat menyampaikan aspirasi serta masukannya untuk kemudian dipaparkan oleh BPD sebagai perwakilan kepada pemerintah desa dalam rapat tingkat desa.

Tahapan selanjutnya adalah rembuk bersama BPD dan pemerintah desa untuk mencapai keputusan. Hasil keputusan ini kemudian disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk informasi dan peraturan desa.



### **Gambar 1 Alur pengambilan keputusan desa**

Penyampaian peraturan desa sendiri umumnya dilakukan melalui papan pengumuman di balai desa dan kantor kepala desa. Tak ayal kendala kurang tersebarnya hasil rapat dan minimnya sosialisasi membuat masyarakat cenderung terlambat mengetahui peraturan terbaru.

Sementara itu penggunaan ponsel terutama ponsel pintar di pedesaan kini telah mencapai hampir 100 persen per kepala keluarga. Penggunaan internet juga sudah menjadi konsumsi sebagian besar warga desa. Hal ini memungkinkan teknologi komunikasi dan media sosial menjadi sarana penyebaran hasil keputusan rapat bagi seluruh warga desa.

Namun sebagian perangkat BPD masih kesulitan dalam menggunakan teknologi komunikasi dan media sosial. Untuk itu diperlukan pendampingan tata cara penggunaan teknologi komunikasi dan media sosial yang baik dan terarah bagi para perangkat desa ini agar dapat mengoptimalkan penyebaran keputusan desa.

#### **Metode Pelaksanaan**

Sasaran kegiatan ini adalah anggota BPD dan perangkat Desa Tirta Harja Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin sebanyak lima orang yang dipercaya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat setempat untuk mengikuti pendampingan penggunaan teknologi komunikasi dan media sosial ini. Sebagaimana yang dikemukakan Creswell (2012) metode yang digunakan ini menjabarkan perencanaan dan menggambarkan hasilnya. Metode ini bukanlah pengujian validitas hipotesis atau relevan tidaknya validasi hasil tetapi memberikan penggambaran dan analisis data yang bertujuan menemukan bahan kajian lebih lanjut. Pendampingan digital literasi bagi BPD Desa Tirta Harja Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin sebagai kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pengamatan, pendampingan dan evaluasi penggunaan teknologi-media sosial dengan rincian sebagai berikut :

#### **a. Tahapan pengamatan**

Sebelum melakukan pendampingan teknologi tim pengabdian melakukan pengamatan pola penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat melalui BPD di Desa Tirta Harja Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin sendiri memiliki 19 Kecamatan, dimana Kecamatan Muara Sugihan memiliki 22 Desa dan Desa Tirta Harja adalah salah satu Desanya. Tim juga menghimpun lima orang informan pada pengamatan ini yaitu anggota BPD, Kepala Desa, Masyarakat dan Tokoh Masyarakat berjumlah 5 Orang. Selain itu juga tim juga menyebarkan angket yang berisi tentang

b. **Tahap pendampingan** adalah tahapan transfer pengetahuan dasar tata cara penggunaan teknologi komunikasi dan media sosial. Tahapan ini dibagi menjadi yaitu:

- (1) Pemberian pengetahuan dalam sesi materi dimana para perwakilan BPD dan perangkat desa menerima materi terkait peranan BPD selaku legislatif atau perwakilan masyarakat desa. Di sini pengabdian memberikan pemahaman pentingnya kemampuan berkomunikasi dan transfer komunikasi yang baik untuk penyampaian aspirasi. Dan pentingnya perekaman dilakukan tiap rapat dengan warga untuk menghindari salah persepsi. Materi kemudian dilanjutkan dengan penggunaan teknologi dan aneka media sosial yang potensial digunakan untuk menyebarkan informasi kepada warga desa. Sesi ini berlangsung selama dua hari. Di sini peserta juga dipahamkan terkait peranan internet dalam penyaluran informasi melalui teknologi komunikasi dan media sosial. Selain itu juga peserta juga dikenalkan pada sejumlah media sosial potensial seperti facebook, instagram, dan youtube yang akan menjadi instrument penunjang penyampaian informasi kepada warga. Materi disampaikan dengan metode kuliah, dengan sesi Tanya jawab dan diskusi terbuka.
  - (2) Sesi praktek dan pendampingan menggunakan alat gawai dan komputer. Sesi ini dilakukan selama tiga hari dengan pendampingan secara intensif. Peserta mempraktekkan materi dengan membuka *line* atau kontak khusus untuk menerima aspirasi masyarakat di whatsapp. Peserta juga melakukan praktek sosialisasi hasil sejumlah rapat beberapa bulan ke belakang serta hasil keputusan pembangunan dilengkapi dengan detail pendanaan pembangunan tersebut. Kesemuanya dilakukan menyebarkan lewat teknologi komunikasi gawai dan computer.
- c. **Evaluasi**, pada tahapan ini selama dua hari tim melakukan survey hasil penyebaran informasi yang dilakukan BPD dan perangkat terkait desa terkait hasil rapat. Tim juga melakukan evaluasi hasil survai bersama para peserta pelatihan untuk melihat hal apa



saja yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini berlangsung selama sepekan

**Gambar 2 Tahapan PKM Desa Tirta Harja**

### **Hasil dan Pembahasan**

Untuk pengamatan dan pemahaman permasalahan pada mulanyatim melakukan wawancara dengan Sujarwo selaku kepala desa bertempat di Kantor Desa Tirta Harja. Sujarwo menggambarkan sejumlah permasalahan mendasar. Salah satu diantaranya adalah kurang aktifnya BPD Tirta Harja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga untuk langkah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya melalui Pemerintah Desa atau jajaran di Desa Tirta Harja itu sendiri. Sementara itu melalui sekretaris BPD bapak David Triyono bertempat di kantor Pemerintahan Desa diketahui bahwa kegiatan Musrenbang Desa biasanya tetap dilaksanakan di Desa Tirta Harja walaupun pelaksanaannya masih belum optimal.

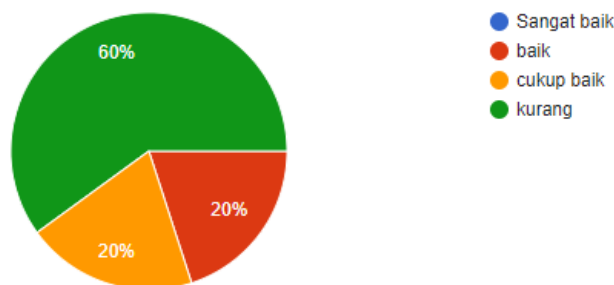
Sementara itu dari angket yang disebarakan tim kepada masyarakat di Desa Tirta Harja, ditemukan fakta bahwa 80 persen fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa sudah cukup baik. Namun hasil rancangan maupun kesepakatan dengan Pemerintahan Desa seringkali lambat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan maka tim memperoleh kesimpulan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsi dan tugasnya sebagai legislasi warga desa dan minimnya inisiatif dalam pengawasan peraturan Desa oleh BPD kepada Pemerintah Desa.

Hasil survey yang dikumpulkan juga menunjukkan fungsi BPD sebagai legislatif dapat dikatakan terlaksana tetapi penjalanan fungsi legislasi sebagai pengayom dan pengawas bisa dikatakan belum maksimal karena minimnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya.

Komunikasi antara BPD dan Pemerintah Desa tidak berjalan dengan baik, Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sarimin warga Dusun Empat Desa Tirta Harja yang menyatakan BPD jarang mengunjungi masyarakat Desa sehingga mengakibatkan pola komunikasi tidak efektif.

Hal senada dengan hasil angket peneliti kepada 5 responden menyatakan 60 persen fungsi BPD dalam penyampaian aspirasi masyarakat masih kurang berikut hasil angketnya.



Gambar 3. Hasil Angket fungsi BPD dalam penyampaian aspirasi masyarakat

Faktor-faktor yang turut berpengaruh pada efektivitas BPD terdiri dari sejumlah faktor pendukung diantaranya adalah adanya dukungan dari masyarakat, pola hubungan masyarakat, pendapatan insentif, dan sistem pemilihan anggota BPD. Sabagai

faktor penghambat yaitu dari masyarakat maupun BPD itu sendiri masih belum paham fungsi dan tugas dari BPD, serta ketiadaan sosialisasi dari pemerintah Desa terkait fungsi maupun tugas BPD, sarana dan prasarana BPD masih belum memadai, dan minimnya penggunaan teknologi komunikasi meskipun jaringan internet di desa sudah cukup baik.

Untuk kendala penyebaran informasi sendiri BPD mengakui sebagian anggota masih kesulitan dalam menggunakan teknologi komunikasi. Namun dari hasil survey diketahui bahwa seluruh anggota BPD memiliki ponsel pintar (*smart phone*) atau gawai. Untuk komputer hanya satu anggota BPD yang mengaku memiliki komputer untuk menunjang usaha sehari-hari.

Warga sendiri hampir keseluruhan kepala keluarga di Desa Tirta Harja memiliki ponsel pintar. Hal ini akan menjadi peluang bagi solusi masalah komunikasi penyebaran informasi hasil rapat BPD dan Pemerintah desa sekaligus memudahkan penjangkauan distribusi aspirasi dari warga ke BPD menuju solusi bersama perangkat desa.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa fungsi dan tugas dari BPD antara lain:

### **1. Fungsi Legislatif**

Dalam menerapkan peraturan Desa BPD bekerjasama dengan kepala Desa. dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa bahwa telah dilaksanakan dengan baik dan dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi juga sudah berjalan dengan baik.

### **2. Fungsi Pengayom**

Dan untuk fungsi BPD sebagai pengayom masih kurang dalam memahami dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik.

sehingga keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pembangunan Desa Tirta Harja tidak tersampaikan, dari sini dapat dikatakan BPD belum optimal.

### **3. Fungsi Pengawasan**

Fungsi BPD sebagai pengawasan di Desa Tirta Harja belum terlalu maksimal walaupun dalam pelaksanaan Pemerintah Desa ini bersifat kultur, namun sifat kultural yang dimiliki justru tidak berjalan sesuai fungsinya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sujarwo dan David Triyono yang menyatakan pengawasan BPD tidak optimal dikarenakan keterlibatan kekeluargaan antara BPD dan Pemerintah Desa sehingga pola pengawasan belum berjalan secara maksimal.

Dari hasil pengamatan tim kemudian menyusun solusi bagi permasalahan yang ada di penyebaran informasi oleh BPD. Solusi yang diambil adalah pemberian transfer pengetahuan dasar tata cara penggunaan teknologi komunikasi dan media sosial. Tahapan ini dibagi menjadi yaitu : (1) Pemberian pengetahuan dalam sesi materi dimana para perwakilan BPD dan perangkat desa menerima materi terkait peranan BPD selaku legislatif atau perwakilan masyarakat desa. (2) Sesi praktek dan pendampingan menggunakan alat gawai dan komputer.

Hari pertama pendampingan tim memberikan materi pentingnya kemampuan berkomunikasi dan transfer komunikasi yang baik untuk penyampaian aspirasi. Selain itu juga dijabarkan tentang tata cara perekaman atau dokumentasi rapat yang secara ideal harus dilakukan dilakukan tiap rapat dengan warga untuk menghindari salah persepsi. Usai materi tersebut dilanjutkan dengan materi tentang penggunaan teknologi dan aneka

media sosial yang potensial digunakan untuk menyebarkan informasi kepada warga desa sekaligus juga tata cara pemanfaatannya dan fitur yang wajib diketahui oleh peserta. Baik materi pertama dan kedua berlangsung selama dua hari.



Gambar 4 Salah satu laman yang dihadirkan pada materi yang menjadi contoh penggunaan media sosial bagi desa

Dalam materi ditekankan tentang pemahaman terkait peranan internet dalam penyaluran informasi melalui teknologi komunikasi dan media sosial. Peserta juga dikenalkan pada sejumlah media sosial yang banyak digunakan pada umumnya seperti facebook, instagram, dan youtube yang akan menjadi alat penunjang penyampaian informasi kepada warga. Materi disampaikan dengan metode kuliah, dengan sesi Tanya jawab dan diskusi terbuka.



## Gambar 5 Suasana materi bersama anggota BPD

Sesi praktek dan pendampingan menggunakan alat gawai dan komputer. Sesi ini dilakukan selama tiga hari dengan pendampingan secara intensif. Peserta mempraktekkan materi dengan membuka *line* atau kontak khusus untuk menerima aspirasi masyarakat di whatsapp. Peserta juga melakukan praktek sosialisasi hasil sejumlah rapat beberapa bulan ke belakang serta hasil keputusan pembangunan dilengkapi dengan detail pendanaan pembangunan tersebut. Kesemuanya dilakukan menyebarkan lewat teknologi komunikasi gawai dan computer.

Pada tahapan ini selama dua hari tim melakukan survey hasil penyebaran informasi yang dilakukan BPD dan perangkat terkait desa terkait hasil rapat. Tim juga melakukan evaluasi hasil survai bersama para peserta pelatihan untuk melihat hal apa saja yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini berlangsung selama sepekan

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil Pengamatan disimpulkan masih kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap peran dan tugasnya dan dalam pengawasan peraturan Desa. Kendala ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan BPD terhadap Pemerintah Desa masih sangat lemah.

Dari sisi komunikasi , pola komunikasi BPD dalam menerima, menyampaikan dan menyebarkan hasil keputusan aspirasi dan peraturan desa dinilai tidak berjalan lancar. Dari survey juga menunjukkan fungsi BPD sebagai lelatif sudah terlaksana namun dalam fungsi BPD sebagai pengayom dan pengawas masih maksimal dalam pelaksanaanyadikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPDterhadaptugasdan fungsinya.

Untuk itu lewat pengabdian kepada masyarakat ini tim melakukan pendampingan penggunaan teknologi komunikasi untuk mempermudah saluran penyampaian pesan dari masyarakat ke BPD untuk kemudian disampaikan ke pemerintah desa. Pendampingan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan lamanya melalui tahapan pengamatan yang terdiri dari pengamatan langsung dan survey. Kemudian dicapai kesimpulan dan pola solusi melalui kegiatan pendampingan digital literasi dan penggunaan teknologi komunikasi terhadap sejumlah anggota BPD. Tahapan terakhir dari pengabdian pada masyarakat ini adalah evaluasi dari keseluruhan pendampingan untuk mengetahui apakah pendampingan sudah tepat sasaran.

### **Ucapan Terima Kasih**

Pengabdi sekaligus penyusun mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin khususnya BPD dan Perangkat pemerintahan Desa Tirta Harja Kecamatan Muara Sugihann Kabupaten Banyuasin yang dengan tangan terbuka bekerja sama atas terselenggaranya program pendampingan ini.

### **Daftar Pustaka**

Kodoatie, 2005. *Dasar Dasar Pengambilan Kebijakan*. Balai Pustaka : Jakarta. Mikkelson, 2001. *Konsep Partisipasi Masyarakat*. Malang, (dalam buku Zukkarnain Nasution).

Sunyoto, Usman. 2004. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Wardhaningsih, A. D., & Pamungkas, S. (2019). Pelatihan Literasi Media Menghadapi Era Industri 4.0 Bagi Ibu Rumah Tangga Di Daerah Tangerang. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKMCSR)*, 2, 932-944.